PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**Nurthia Nova
Celsy Rahmadani
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
e-mail: celsirahmadani@gmail.com**

ABSTRAK

Secara umum terdapat beberapa kasus tindak pidana perusakan hutan yang pernah terjadi dan dipublikasikan di media massa, yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundangan nasional, akan tetapi saat ini banyak sekali orang yang melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan. Pembakaran hutan adalah suatu tindakan membakar di dalam kawasan hutan, jika tidak dengan izin pejabat kehutanan maka merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering dan hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dan proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (KUHP). Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, lokasi yang jauh atau jarak tempuh yang jauh, dan sulit dalam menemukan saksi, yang berakibat pada hukuman pelaku menjadi ringan karena tidak cukup bukti, padahal akibat dari kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas.

Kata Kunci: Hambatan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Penegakan Hukum Pidana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembakaran hutan adalah suatu tindakan membakar di dalam kawasan hutan, jika tidak dengan izin

pejabat kehutanan maka merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda

dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku,¹ sedangkan kebakaran hutan dan lahan adalah, kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain sebagainya). Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar atau pohon yang bagian atasnya. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini yaitu dimulai dari tahun 2019 sepanjang 328.724 hektar dan di tahun 2020 sepanjang 300.000 hektar hutan dan lahan yang telah terbakar.²

BNPB memetakan daerah

rawan atau daerah langganan dalam kebakaran hutan dan lahan adalah di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan di Indonesia penyebabnya adalah 99% ulah manusia dan 1% nya adalah alam. Alasan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia antara lain, tidak sengaja karena buang putung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar.³ Sesuai prinsip dan aturan hukum bahwa, setiap orang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan atau lahan kecuali, dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang ditentukan. Adapun tujuan pelaku melakukan pembakaran hutan atau lahan diantaranya pembakaran hutan atau

¹Alam Setia Zain, 1996, *Bentuk Kerusakan Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 49.

²Rifa Yusya Adilah, kebakaran hutan di Indonesia tahun 2020, <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-81-persen.html> diakses pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 19:18 WIB.

³Gloria Setyvani Putri, *BNPB Sebut 6 Provinsi Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2019/08/07/162900323/bnpb-sebut-6-provinsi-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan/> diakses pada Hari Rabu 07 Agustus 2019 pukul 16:29 WIB.

lahan untuk kepentingan pembuatan padang rumput makanan untuk hewan ternak dan pembakaran hutan dilakukan hanya untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.⁴ Hutan atau lahan perlu adanya pengawasan atau perlindungan dari aparaturnegara dan pihak yang berwenang untuk melindungi hutan dan pihak tersebut biasa disebut sebagai Polisi Hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Hutan bahwa polisi hutan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Contoh kasus kebakaran hutan di Indonesia salah satunya di wilayah Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan seluas 37.362 hektar dan khususnya untuk di Kabupaten

Ogan Komering Ilir ada 9 orang pelaku, yang diamankan di 6 lokasi yang berbeda, dan ditangkap di daerah Jejawi, Pedamaran, Kayuagung, dan Air Sugihan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKI mendata kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2019 ini paling luas terjadi di Kabupaten OKI. Luas lahan yang terbakar pada musim kemarau tahun itu mencapai 250.000 hektare lebih dari jumlah itu sekitar 135.000 atau 50% lebih berada di Kabupaten OKI.⁵

Bagi pelaku yang didaerah Kayuagung OKI berinisial AR (56) mengaku membakar dengan alasan untuk membuka lahan perkebunan yang bertujuan untuk menanam padi dan jagung. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu korek api dan sisa bekas pembakaran. Setelah pelaku diamankan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka, bagi tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁴ Alam Setia Zain, *Op.Cit.*, hlm 50.

⁵ Data BPBD Kab.OKI Kota Kayuagung.

Lingkungan Hidup dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),⁶ akan tetapi sayangnya peran polisi hutan belum maksimal dalam upaya penegakan hukum pencegahan pembakaran hutan.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Penegakan hukum pidana merupakan bagian atau sub sistem dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem atau kebijakan pembangunan nasional.⁸ Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat suatu

⁶ Raja Adil Siregar, 9 Pembakar lahan dan hutan di OKI Sumsel ditangkap, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190815212923-12-421770/polres-oki-tangkap-6-terseangka-pembakar-lahan-hutan-untuk-kebun/>

⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm.35.

⁸ Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.35.

penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering dan hambatan dalam penegakan hukumnya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk memahami penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering dan hambatan dalam penegakan hukumnya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, atau

penelitian terhadap bagaimana berlakunya hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan data primer atau data lapangan sebagai bahan utamanya.⁹

III. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

Proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Laporan merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana, terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP. laporan adalah pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang menyaksikan maupun orang yang mengalami tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak berwajib agar segera

ditindaklanjuti.¹⁰ Kaitannya dengan delik kebakaran hutan dan lahan adalah setiap orang yang melihat, mengalami atau menjadi korban dalam terjadinya kebakaran hutan atau lahan tersebut, berhak melaporkan ke pihak yang berwajib, berdasarkan laporan tersebut maka dilakukanlah proses penyelidikan oleh Polri.

Penyelidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun bukti dalam perkara kebakaran hutan dan lahan ini diantaranya, lahan yang sudah terbakar, sisa bensin di lokasi kebakaran, alat pemantik api dan lain

⁹ Abdul Hamid Usman, 2011, *Pedoman Penulisan Penelitian dan Skripsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 18.

¹⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.75.

sebagainya. Pada kasus kebakaran hutan dan lahan penyidik melakukan beberapa upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP yaitu:

Pertama, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan. Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berupa kurungan selama kurang lebih 60 hari. Dengan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang didapatkan. Dan jika penyidik tidak mendapatkan alat bukti yang cukup maka dalam 1x24 jam tersangka berhak dibebaskan.

Kedua, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntut dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan penangkapan bagi pelaku kebakaran hutan biasanya dilakukan dengan cara tangkap tangan berdasarkan Pasal 111 KUHAP penangkapan terhadap tersangka biasanya terjadi pada saat kebakaran atau beberapa hari setelah kebakaran tersebut terjadi.

Ketiga, Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan seorang penyidik yang dengan izin dibenarkan oleh undang-undang berhak melakukan penggeledahan terhadap tersangka. Dan penggeledahan ada dua yaitu penggeledahan fisik dan penggeledahan rumah atau kantor. Penggeledahan fisik ini biasanya telah ditemukan sebuah alat bukti semisal sebuah korek api dan di

tubuh tersangka masih tersisa ciuman aroma bau minyak bensin dibandingkan pelaku yang lain-lain dan masih tersisa bekas hitam di tangannya seperti goresan sebuah abu atau arang. Sedangkan penggeledahan rumah atau kantor biasanya disini terjadi adalah sebuah kantor yaitu kantor pengawasan dan biasanya di kantor ini sudah mempunyai trik atau strategi untuk merancang terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Keempat, Penyitaan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan penuntutan. Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, pihak penyidik melakukan penyitaan barang secara paksa terhadap pelaku dengan dipergunakan secara langsung untuk tidak menghalang-halangi para penyidik untuk mencari sebuah kebenaran.

Kelima, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Penuntutan dalam perkara kebakaran hutan dan lahan apabila semua alat bukti dan saksi benar dan tertuju kepada pelaku atau tersangka maka jaksa penuntut umum berhak melakukan penuntutan atas apa yang telah diperbuat oleh tersangka. Jika tersangka sudah terbukti dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum menuntut bersalah menurut Pasal 78 ayat (3) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan “pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)” dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang yang

melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda anantara Rp 3-10 Milyar rupiah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Budi Mulya selaku kepala Unit Tindak Pidana Khusus pada Polisi Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung menjelaskan bahwa, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah penyesuaian dengan aturan undang-undang yang berlaku atau sesuai ketentuan dengan pasal tentang kehutanan atau perlindungan hutan dan lahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Khusus (*Lex Specialis*), dimana salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Dan ketentuan hukum *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis* atau umum.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Ipda Budi

Keenam, peradilan yaitu suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuri Aipha Fawnia, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kayuagung, menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan pada setiap perkara pidana sudah mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh badan hukum itu tersendiri, sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Serta kembali lagi kepada para pemerintah daerah setempat untuk melakukan sebuah himbauan dengan mengadakan penyuluhan oleh Polisi, Hakim, dan para aparat badan hukum lainnya kepada masyarakat langsung agar tidak sembarangan membakar hutan dan lahan secara ilegal. Beliau juga menambahkan bahwa kebakaran hutan dan lahan

Mulya, Kadit Tindak Pidana Khusus Polres OKI, tanggal 02 Juni 2021.

menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat Ogan Komering Ilir saja, tapi masyarakat luas.¹² Perkara kebakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Kayuagung diancam Pasal 108 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar.

B. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan tidaklah mudah, banyak hambatan yang dilalui oleh penegak hukum maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Budi Mulya, Hambatan-hambatan yang dialami tidak begitu

sulit, tapi ada satu hal hambatan yang mungkin pernah dialami yaitu jika terjadinya kebakaran hutan yang posisinya jauh dari pemukiman penduduk atau jauh dari rumah penduduk, maka dari itu penyidik cukup sulit menemukan saksi karena posisi kebakaran hutan tersebut jauh dari rumah penduduk atau pemukiman.¹³ Saksi mempunyai peran penting dalam suatu kasus pidana, tidak hanya dalam kasus kebakaran hutan saja tapi setiap kasus pidana peran saksi memang sangat dibutuhkan atau diperlukan untuk bahan penyidikan, agar lebih memudahkan para penyidik dan ahli hukum menentukan perkara tersebut. Saksi termasuk bagian dari alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP ayat (1). Saksi, menurut Pasal 1 butir KUHAP, Keterangan Saksi yang dimaksud adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta ia

¹² Hasil wawancara dengan Yuri Alpha Fawnia, Hakim di Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 03 Juni 2021.

¹³ Hasil wawancara dengan Budi Mulya, Kepala Unit Tindak Pidana Khusus, tanggal 02 Juni 2021.

saksikan sendiri. Keterangan Ahli, menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Keterangan Terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Ipda Budi Mulya mengatakan Tindak Pidana Khusus Polres OKI Kayuagung mendapatkan peringkat 1 dalam penanganan perkara kasus pidana kebakaran hutan dan lahan dari 11 kasus perkara kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dan Polres OKI Kayuagung mendapat suatu penghargaan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuri Alpha Fawnia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung. sejauh

ini tidak ada hambatan yang berpengaruh dari penegakan hukum pidana itu tersendiri, sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Dan perbuatan manusia itu melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pelaku.

karena setiap orang yang melawan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka akan diancam atau dipidana dan diproses pemidanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan atau diperbuat oleh si terdakwa dan juga dilihat dari segi besar kecilnya, banyak sedikitnya perbuatan tersebut yang telah diperbuat. Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, dalam terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berlakulah Undang-Undang Pidana Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai

kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contoh perkara tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu perkara Nomor Perkara 84/pid.B/LH/2021/PN Kag. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (KUHP).

2. Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, lokasi yang jauh atau jarak tempuh yang jauh, dan sulit dalam menemukan saksi, yang berakibat pada hukuman pelaku menjadi ringan karena tidak cukup bukti, padahal akibat dari kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas.

B. Saran

1. Terbatasnya undang-undang menyebabkan hukuman terhadap pelaku menjadi ringan, dan perlu adanya aturan-aturan hukum yang lebih tegas lagi mengingat

dampak kebakaran hutan dan lahan sangat berbahaya.

2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam proses penyidikan sehingga dapat mempermudah dalam mencari alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Usman, 2011, *Pedoman Penulisan Penelitian dan Skripsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang.

Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alam Setia Zain, 1996, *Bentuk Kerusakan Hutan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Data BPBD Kabupaten OKI Kota Kayuagung.

Gloria Setyvani Putri, *BNPB Sebut 6 Provinsi Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2019/08/07/162900323/bnpb-sebut-6-provinsi-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan/>

Raja Adil Siregar, 9 Pembakar Lahan dan Hutan di OKI Sumsel

Ditangkap, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190815212923-12-421770/polres-oki-tangkap-6-tersangka-pembakar-lahan-hutan-untuk-kebun/>

Rifa Yusya Adilah, kebakaran hutan di Indonesia tahun 2020, <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-81-persen.html>

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan